

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Republik Dominika merupakan salah satu negara Amerika tengah yang terletak di wilayah laut Karibia tepatnya di bagian barat pulau Hispaniola. Negara tersebut berseberangan langsung dengan negara Haiti yang menempati bagian sebelah barat pulau Hispaniola. Kedua negara ini memiliki sejarah tersendiri terkait kolonialisme. Meskipun kedua negara menetap di satu kepulauan Hispaniola, akan tetapi penjajah yang mendiami masing-masing negara tersebut berbeda. Republik Dominika merupakan bagian pulau Hispaniola yang pertama kali dijajah oleh Eropa, yang kemudian dalam perkembangan sejarahnya dijajah oleh negara Spanyol. Berbeda dengan bagian barat pulau Hispaniola, negara Haiti dijajah oleh bangsa Prancis.¹ Dalam sejarahnya, penjajah Prancis banyak mendatangkan dan mempekerjakan budak Afrika, dan pada akhir abad ke-18 terdapat kurang lebih 500.000 budak Afrika yang menetap dan bekerja kepada kolonial Prancis di bagian barat pulau Hispaniola.²

Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai budak kolonial Perancis, muncul keinginan dari para budak Afrika untuk mendirikan negara mereka sendiri. Alhasil, ketika kekuatan kolonial melemah, disebabkan gejolak revolusi yang terjadi di

¹ History World, *History Of Dominican Republic*, <http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab43> (28/03/2017, 21:43 WIB)

² Alexandra Silver, *Haiti And Dominican Republic: A Tale Of Two Countries*, <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1953959,00.html>, (28/03/2017, 22:13 WIB)

Perancis pada tahun 1790-an, para budak Afrika memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pemberontakan terhadap Prancis dan berhasil mendeklarasikan kemerdekaan mereka pada tahun 1804.³ Singkat sejarah, dalam perkembangannya masyarakat Haiti yang dipimpin oleh Jean Pierre Boyer, kemudian menginvasi wilayah timur pulau Hispaniola yang dijajah oleh Spanyol, Haiti berhasil merebut wilayah tersebut dan menyatukan seluruh pulau Hispaniola di bawah pemerintahan Republic of Haiti. Haiti memegang kendali atas wilayah sebelah timur pulau Hispaniola selama 22 tahun, terhitung dari tahun 1822 sampai 1844. Berakhirnya kendali atas wilayah timur pulau Hispaniola tersebut disebabkan karena munculnya gerakan oposisi yakni *La Trinitaria* yang dipelopori oleh Juan Pablo Duarte untuk melakukan pemberontakan kepada Republic of Haiti pasca sepeninggalnya presiden Haiti Jean Pierre Boyer. Pemberontakan yang dipelopori oleh Juan Pablo Duarte tersebut memperoleh keberhasilan. Republik Dominika kemudian dengan segera mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1844.⁴

Kedua negara ini kemudian memiliki tata sistem pemerintahan masing-masing, dalam perkembangannya dibidang ekonomi, tercatat bahwasanya Republik Dominika memiliki tingkat perekonomian yang lebih tinggi daripada Haiti. Ditinjau dari segi geografis, tanah di sebelah timur pulau Hispaniola memiliki kualitas tanah yang lebih subur jika dibandingkan dengan tanah sebelah barat Hispaniola. Sehingga mengakibatkan arus imigran yang datang dari Haiti ke Republik Dominika meningkat. Warga Haiti bermigrasi demi untuk meningkatkan taraf

³ Ibid.

⁴ Jalisco Lancer, *The Conflict Between Haiti and the Dominican Republic*, http://www.allempires.com/article/index.php?q=conflict_haiti_dominican, (28/03/2017, 23:54 WIB)

perekonomiannya serta untuk mencari kehidupan yang lebih baik, mengingat perekonomian di Republik Dominika lebih unggul dibandingkan negara tempat mereka berasal. Warga Haiti yang bermigrasi ke Republik Dominika, mayoritas bekerja dibidang pertanian tebu dan menjadi pegawai di perusahaan swasta.⁵

Pada tahun 1930, Republik Dominika dipimpin oleh seorang presiden yang terkenal dengan kepemimpinan diktatornya, yakni Rafael Leonidas Trujillo Molina. Seiring dengan meningkatnya jumlah imigran yang masuk ke Republik Dominika, presiden Rafael Trujillo menganggap bahwa kedatangan para imigran Haiti merupakan suatu ancaman bagi Dominika, mengingat setelah apa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya, ketika Haiti menduduki wilayah Republik Dominika selama 22 tahun. Presiden Rafael Trujillo juga menganggap bahwasanya secara rasial, masyarakat Dominika memiliki perbedaan keturunan dengan masyarakat Haiti. Menurutnya, masyarakat Haiti memiliki darah keturunan dari Eropa dan Spanyol, sedangkan masyarakat Haiti memiliki darah keturunan Afrika. Berangkat dari asumsi tersebut, presiden Trujillo kemudian melakukan tindak genosida terhadap para imigran Haiti yang berada di Republik Dominika pada tahun 1937 yang dikenal dengan istilah *Parsley Massacre*. Tindak genosida tersebut menewaskan sejumlah 20.000 lebih imigran Haiti yang berada di Republik Dominika.⁶

⁵ Max, *The Dominican Republic and Haiti: one island, two nations, lots of trouble*, <http://www.economist.com/news/americas/21698805-one-about-hold-elections-other-has-not-had-proper-government-months>, (28/03/2017, 23:11 WIB)

⁶ Palash Ghosh, *Parsley Massacre: The Genocide That Still Haunts Haiti-Dominican Relations*, <http://www.ibtimes.com/parsley-massacre-genocide-still-haunts-haiti-dominican-relations-846773>, (29/03/2017, 00:08 WIB)

Perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh presiden Rafael Trujillo terhadap imigran Haiti, dalam perkembangannya kemudian menjadi benih doktrin diskriminatif bagi masyarakat Dominika terhadap warga Haiti beserta keturunannya, bahwasanya penduduk asli yang berhak atas negara Republik Dominika adalah mereka yang memiliki darah keturunan Eropa dan Spanyol bukan warga yang memiliki darah keturunan Afrika kulit hitam. Sehingga warga keturunan Haiti yang tinggal dan menetap di Dominika kurang mendapat perhatian penuh dari masyarakat Dominika.⁷

Permasalahan perekonomian menjadi faktor utama bagi imigran Haiti untuk mencari kehidupan lebih layak di Republik Dominika. Data dari *The Organisation for Economic Co-operation and Development* menunjukkan bahwasanya populasi imigran terbesar di Republik Dominika berasal dari Haiti. Total imigran yang berada di Republik Dominika pada tahun 2010 berjumlah 311.969 jiwa dengan presentase sebesar 78,8 % total keseluruhan imigran yang berada di Republik Dominika. Pada tahun 2012 Imigran Haiti berjumlah 458.233 jiwa dengan presentase 87,3 % dari total imigran di Republik Dominika.⁸ Jumlah tersebut tidak mewakili total keseluruhan dari imigran Haiti yang berada di Republik Dominika. Hal ini dikarenakan banyak dari para imigran Haiti yang mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintahan Republik Dominika. Sehingga sulit bagi mereka untuk bisa mendapatkan *Cédula* yakni kartu tanda kependudukan yang berlaku di Republik Dominika.

⁷ Roque Planas, *My Mother Told Me Never To Marry A Black Woman': How Race Works In The Dominican Republic*, http://www.huffingtonpost.com/2015/07/07/dominican-republic-racism_n_7716596.html, (29/03/2017, 01:12 WIB)

⁸ OECD, *How Immigrants Contribute to the Dominican Republic's Economy*, OECD Publishing, 2018, Hal.50

Imigran Haiti yang tinggal di Republik Dominika tidak diperkenankan untuk hidup di perkotaan, mereka tinggal di pemukiman kumuh yang disebut *bateyes*. Hal ini dikarenakan masyarakat Republik Dominika tidak pernah bisa menerima warga Haiti untuk hidup berdampingan, terdapat kelompok *Antihaitianismo* yang menyuarakan kemurnian ras Republik Dominika, bagi mereka imigran Haiti bukanlah penduduk resmi yang boleh menetap seenaknya tanah kelahiran mereka. Selain itu, aparat kepolisian juga selalu memandang imigran Haiti sebagai pendatang ilegal dan dengan segera menangkap mereka yang berkulit hitam serta tidak bisa berbahasa Spanyol untuk kemudian mengusir mereka keluar dari Republik Dominika. Imigran Haiti dapat melangsungkan kehidupan sehari-hari serta mencari perlindungan keamanan hanya di *bateyes*, dimana industri gula memanfaatkan tenaga kerja manual mereka dengan imbalan upah minim dan jaminan keamanan agar bisa menetap di Republik Dominika.⁹

Pelayanan HAM akan diberikan oleh pemerintah Republik Dominika untuk masyarakat yang sah atas kewarganegaraan Republik Dominika semata. Hal serius yang terjadi di Republik Dominika adalah, mereka tidak pernah menganggap bahwasanya keturunan imigran Haiti yang lahir di Republik Dominika berhak atas kewarganegaraan Republik Dominika seperti yang tercantum dalam konstitusi dasar, terkecuali anak pejabat atau diplomat Haiti yang lahir di Republik Dominika akan diberikan hak untuk mengklaim kewarganegaraan Republik Dominika. Kewarganegaraan Republik Dominika juga berlaku bagi para imigran Haiti yang memegang *Cedula*, akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2004, otoritas Republik

⁹ Raul Zecca Castel, *Extorted And Exploited: Haitian Labourers On Dominican Sugar Plantations*, <https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/extorted-and-exploited-haitian-labourers-on-dominican-sugar-plantations/>, (29/03/2017 01:23 WIB)

Dominika mengeluarkan suatu peraturan terkait status para imigran di Republik Dominika, peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya siapapun imigran Haiti yang menetap di Republik Dominika meski memiliki *Cedula* sekalipun, dikategorikan sebagai masyarakat bukan penduduk, imigran merupakan orang yang datang untuk sementara waktu dengan status turis transit. Sehingga dengan berlakunya peraturan tersebut, para imigran Haiti tidak dianggap lagi sebagai orang yang berhak untuk menetap di Republik Dominika dalam waktu lama.¹⁰

Pasca pemberlakuan pasal tersebut, dalam tahun-tahun berikutnya perlakuan diskriminatif, rasisme dan xenophobia yang terjadi di Republik Dominika semakin meningkat. Beberapa diantaranya seperti, dokumen para imigran Haiti di klaim tidak berlaku lagi dan kepengurusan kartu perpanjangan izin tinggal selalu dipersulit bagi imigran Haiti. Sehingga banyak dari mereka ditangkap secara paksa dan terancam di deportasi dari Republik Dominika. Keturunan imigran Haiti yang lahir di Republik Dominika yang secara dasar konstitusi Republik Dominika menganut *ius soli* mendapat perilaku sewenang-wenang dengan tidak diperbolehkan untuk mengurus sertifikat kelahirannya. Hal ini secara tidak langsung juga membatasi anak-anak keturunan Haiti yang lahir di Republik Dominika untuk tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan akses publik lainnya.¹¹

Pada tanggal 23 September 2013, Mahkamah Konstitusi Dominika mengeluarkan peraturan No. 168-13 yang menyatakan bahwa bagi anak keturunan

¹⁰ Indira Goris, *The Compromised Right To Nationality In The Dominican Republic*, <https://www.justiceinitiative.org/uploads/9028d7d6-3053-4a6a-b245-98333732572e/right-to-dominican-nationality-20110406.pdf>, (20/03/2017 01:52 WIB)

¹¹ Amnesty International, *Dominican Republic A life in transit - The plight of Haitian migrants and Dominicans of Haitian descent*, AMR 27/001/2007, Hal.1-3

Haiti yang lahir di Republik Dominika setelah tahun 1929 dan bagi anak yang memiliki orang tua dari Haiti tanpa dokumen yang lengkap, akan dicabut hak kewarganegaraannya sebagai warga negara Republik Dominika.¹² Sehingga, bagi siapapun yang memiliki darah keturunan Haiti, mulai dari anak-anak hingga dewasa, yang lahir di Dominika dan tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap, maka tidak berhak atas kewarganegaraan Republik Dominika.

Pelanggaran HAM juga banyak terjadi dalam proses deportasi yang dilakukan oleh Republik Dominika, masih banyak diantaranya yang mengabaikan nilai-nilai terkait HAM. Proses deportasi yang dilakukan tidak berdasar prosedur yang jelas sesuai ketentuan hukum, pelanggaran HAM banyak terjadi dalam proses pengusiran, seperti pengusiran paksa terhadap imigran Haiti baik yang memiliki dokumen lengkap ataupun tidak, perlakuan diskriminatif rasial dalam proses pengusiran juga dilakukan atas dasar identifikasi warna kulit semata. Keseharian imigran Haiti selalu dibayangi rasa takut yang mendalam akan kekhawatiran terulangnya kembali tragedi 1937.¹³

Setelah pemberlakuan peraturan No.168-13, Republik Dominika banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak Internasional, sehingga kemudian pemerintah Republik Dominika mengeluarkan peraturan No.169-14 pada tahun 2014 sebagai solusi untuk menghindari korban deportasi yang berhak atas kewarganegaraan Republik Dominika. Kemudian pemerintah Republik Dominika

¹² Human Rights Watch, *We Are Dominican*, <https://www.hrw.org/report/2015/07/01/we-are-dominican/arbitrary-deprivation-nationality-dominican-republic>, (29/03/2017, 01:34 WIB)

¹³ Amnesty International, *Haiti/Dominican Republic: Reckless deportations leaving thousands in limbo*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/haiti-dominican-republic-reckless-deportations-leaving-thousands-in-limbo/>, (28/03/2017, 23:19)

membuka pelayanan naturalisasi bagi para imigran untuk melakukan pembaruan dokumen agar terhindar dari proses deportasi.¹⁴

Permasalahan terkait pelanggaran HAM yang dialami oleh imigran Haiti beserta keturunannya di Republik Dominika mendorong organisasi internasional yang bergerak dalam permasalahan HAM untuk turut berperan dalam menyelesaikan dan mencari solusi untuk menangani permasalahan HAM yang terjadi di Republik Dominika. Salah satunya adalah Amnesty Internasional sebagai gerakan *global civil society* yang berfokus pada permasalahan HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi di Republik Dominika ini membuat Amnesty Internasional tergerak untuk turut berperan di dalamnya.

Amnesty Internasional merupakan gerakan *global civil society* independen non-profit yang awal mulanya didirikan untuk membela hak tahanan politik agar mendapat porsi hukum yang sama sesuai dengan apa yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Kemudian berkembang seiring dengan isu-isu kemanusiaan yang semakin kompleks, misi utamanya adalah untuk memajukan dan mempromosikan HAM bagi sesuai *Universal Declaration of Human Rights* dan standar internasional lainnya bagi seluruh manusia di dunia. Amnesty Internasional juga memiliki landasan dasar dalam pergerakannya sebagai organisasi internasional, yang tertuang dalam *Amnesty International's Statute*.¹⁵

Adapun upaya yang dilakukan oleh Amnesty Internasional kepada negara Haiti dan Dominika adalah dengan mendesak mereka agar segera menghentikan

¹⁴ Marie Durane, *The Right to Nationality in the Dominican Republic*, <http://hrbrief.org/2015/11/the-right-to-nationality-in-the-dominican-republic-2/>, (04/04/2017, 20:19 WIB)

¹⁵ Amnesty International, *"Who We Are"*, <https://www.amnesty.org/en/who-we-are/>, (28/08/2018, 21:07 WIB)

perilaku semena-mena terhadap imigran Haiti berikut keturunannya yang tinggal di Republik Dominika. Selanjutnya Amnesty Internasional mendesak agar Republik Dominika memperlakukan mereka seperti halnya warga Republik Dominika pada umumnya, menghormati, serta melindungi HAM mereka. Amnesty Internasional juga banyak bekerja sama dengan organisasi baik dalam skala domestik maupun internasional untuk membantu mengupayakan penyelesaian permasalahan HAM bagi imigran Haiti di Republik Dominika, Amnesty Internasional mengajak organisasi ataupun komunitas internasional untuk mendukung Republik Dominika agar segera mengidentifikasi para korban dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.¹⁶

Penghormatan terhadap HAM masih kurang diterapkan secara efektif dan jarang menjadi pertimbangan suatu negara dalam memutuskan peraturan ataupun kebijakan tertentu. Berdasarkan permasalahan yang terjadi yang bermuara dan terkonstruksi dari sejarah masa lampau di Republik Dominika, seperti perlakuan diskriminasi rasial yang mengakar dari permasalahan sejarah, ternyata masih banyak dipraktikkan di Republik Dominika hingga saat ini, baik dalam lingkup sosial masyarakat terlebih lagi dalam lingkup pemerintahan. Sehingga banyak muncul desakan dari berbagai kalangan internasional, Salah satu yang aktif dalam berperan adalah Amnesty Internasional. Amnesty Internasional juga banyak terlibat dalam berbagai upaya dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi, dengan berkampanye, menerbitkan laporan, serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat.

¹⁶ Ibid., Hal. 37-38

Berangkat dari bagaimana upaya Amnesty Internasional dalam memperjuangkan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Republik Dominika terhadap imigran Haiti beserta keturunannya, yang mengakibatkan imigran Haiti beserta keturunannya tidak mendapatkan pelayanan HAM yang layak serta memunculkan tindak diskriminasi, rasisme dan xenophobia yang banyak muncul dari tahun 2004 hingga keluarnya keputusan mahkamah konstitusi Republik Dominika pada tahun 2013 yang bertentangan dengan konstitusi dasarnya. Sehingga melibatkan berbagai pihak dalam mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM Republik Dominika, terutama Amnesty Internasional sebagai pergerakan *global civil society* yang berfokus pada permasalahan HAM, dan banyak terlibat dalam memperjuangkan HAM bagi imigran Haiti di Republik Dominika, membuat penulis tertarik untuk mengkaji fenomena ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan yang diajukan penulis adalah “*Bagaimana upaya Amnesty Internasional dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap imigran Haiti beserta keturunannya di Republik Dominika?*”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perilaku diskriminatif, rasisme dan xenophobia yang dilakukan oleh Republik Dominika terhadap imigran Haiti beserta keturunannya.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong migrasi masyarakat Haiti ke Republik Dominika
3. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Republik Dominika terhadap imigran Haiti beserta keturunannya.
4. Untuk mengetahui pengaruh Amnesty Internasional sebagai organisasi yang bergerak dalam memperjuangkan HAM dalam skala internasional
5. Untuk mengetahui upaya Amnesty Internasional dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap imigran Haiti beserta keturunannya di Republik Dominika

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hubungan internasional terutama dalam permasalahan pelanggaran HAM. Hasil dari penelitian ini juga

diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam penelitiannya.

b. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan baru bagi penulis sesuai dengan tata cara kepenulisan serta penyusunan sistematika penulisan yang telah di ajarkan dengan baik dan benar di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu penulis juga mendapatkan wawasan, informasi serta pengetahuan baru terkait Hak Asasi Manusia dan pergerakan kelompok *global civil society* dalam kajian Hubungan Internasional.

1.4 Penelitian Terdahulu

Dalam meneliti terkait upaya Amnesty Internasional dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap imigran Haiti di Republik Dominika, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu untuk membantu penulis dalam meneliti permasalahan yang akan diteliti. Tujuan penelitian terdahulu disini adalah untuk memperkaya pengetahuan penulis yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti.

Analisis dari Rosita Lina Simamora terkait “Peran Amnesty Internasional Dalam Pembebasan Aung San Suu Kyi” menunjukkan bahwasanya Amnesty Internasional memiliki peran yang cukup signifikan dalam melakukan pembelaan HAM atas Aung San Suu Kyi. Amnesty Internasional mengumpulkan data dan informasi terkait pelanggaran HAM yang dilakukan Junta Militer terhadap Aung San Suu Kyi kemudian memberitakannya secara global kepada pemerhati

permasalahan HAM di dunia. Selain itu Amnesty Internasional juga mendesak pihak Junta Militer agar membebaskan Aung San Suu Kyi. Dalam hal ini Amnesty Internasional terus berupaya untuk memperjuangkan kebebasan Aung San Suu Kyi dengan berbagai cara dan upaya. Dalam upayanya Amnesty Internasional banyak menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik negara, NGOs, organisasi-organisasi pemerhati HAM, dan masyarakat setempat.¹⁷

Selanjutnya dalam karya ilmiah yang berjudul “Peran UNHCR (*United Nation High Commission for Refugees*) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Korban Konflik Suriah Yang Berada Di Negara Transit Hongaria” yang disusun oleh Paulus Salvio Renno Renyaan, berfokus pada konflik internal antara masyarakat dengan pemerintah akibat dampak dari ‘*Arab Spring*’, menyebabkan terhentinya aktifitas warga setempat, serta ancaman keselamatan menghantui masyarakat setempat. Sehingga hal ini memicu masyarakat Suriah untuk mencari tempat pengungsian yang lebih aman. Salah satu negara yang menjadi tujuan para pengungsi adalah Negara Transit Hongaria. UNHCR sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam penanganan pengungsi, memiliki fungsi untuk mengayomi serta menjaga para pengungsi. UNHCR berhasil memainkan perannya dengan baik melalui bantuan kebutuhan sehari-hari kepada para pengungsi dalam menjamin kesehatan dan juga keselamatan para pengungsi.¹⁸

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis disini adalah terkait “Peranan *World Wide Fund For Nature* (WWF) Dalam Upaya Konservasi

¹⁷ Rosita Lina .S, 2013, *Peran Amnesty Internasional Dalam Pembebasan Aung San Suu Kyi*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 1, Samarinda : Universitas Mulawarman.

¹⁸ Paulus Salvio Renno Renyaan, 2015, *Peran UNHCR (United Nation High Commission for Refugees) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Korban Konflik Suriah Yang Berada Di Negara Transit Hongaria*, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya

Populasi Badak Jawa Di Indonesia” oleh Eca Chairunnisa yang menjelaskan terkait permasalahan populasi badak jawa yang cenderung stagnan atau tidak mengalami peningkatan. Selanjutnya WWF melakukan berbagai program serta kegiatan untuk meningkatkan populasi badak jawa. Setelah berbagai program dan kegiatan dijalankan oleh WWF, akhirnya membuahkan hasil dengan meningkatnya populasi badak jawa melalui program dari WWF. Hal ini membuktikan bahwasanya peran WWF cukup signifikan dalam upaya konservasi badak jawa di Indonesia.¹⁹

Selain itu, skripsi lain yang menjelaskan terkait peranan organisasi internasional adalah skripsi yang telah disusun oleh Lucky Deriputra Harefa dengan judul “Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Nigeria, Korban Kelompok Radikal Boko Haram”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai konflik yang dipicu atas dasar perbedaan ideologi, menyebabkan kelompok radikal yakni Boko Haram melakukan berbagai aksi teror yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari kalangan penduduk sipil. Hal ini yang kemudian memicu penduduk sipil untuk mencari tempat pengungsian di negara-negara tetangga Nigeria. UNHCR kemudian dengan sigap menyikapi hal ini dengan memberikan berbagai bentuk bantuan berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Meskipun secara internal UNHCR memiliki kendala finansial dan juga kondisi keamanan di Negeria tidak stabil yang menjadi kendala eksternal bagi UNHCR. Namun secara umum perlindungan dan pengurusan pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR, telah sesuai dengan statuta UNHCR. UNHCR juga banyak menjalin kerjasama perlindungan dan pengurusan pengungsi dengan pemerintah

¹⁹ Eca Chairunnisa, 2014, *Peranan World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Upaya Konservasi Populasi Badak Jawa Di Indonesia*, Skripsi, Bandung : Universitas Komputer Indonesia

Nigeria, pemerintah Negara tetangga dan juga dengan berbagai kalangan organisasi-organisasi kemanusiaan.

Rujukan penelitian terdahulu yang selanjutnya adalah “Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingnya Di Aceh Indonesia/ Ni Made Maha Putri Paramitha” oleh Ni Made Maha Putri Paramitha. Dalam skripsi tersebut dijelaskan peranan penting UNHCR sebagai organisasi yang bergerak dibidang penanganan permasalahan pengungsi sudah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, sesuai dengan statute UNHCR. UNHCR langsung mendatangi lokasi tempat pengungsian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait keberadaan pengungsi Rohingnya di Aceh, Indonesia. Sehingga masyarakat dapat menerima dan tidak mengalami kecanggungan dalam hal penerimaan para pengungsi tersebut. Selain itu, UNHCR juga berkewajiban untuk memberikan informasi secara berkala dalam bentuk data statistik tiap bulannya sebagai wujud transparansi UNHCR di Indonesia.²⁰

Skripsi dari Rachmad Affandi yang berjudul “Peran Green Peace Sebagai Organisasi Internasional Non-Pemerintah (INGO) Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia” menjelaskan mengenai Green Peace yang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan bumi yang hijau dan damai dalam mengatasi isu kerusakan lingkungan di Indonesia. Akibat kepentingan ekonomi hutan di Indonesia yang terkenal sebagai paru-paru dunia mengalami kerusakan hutan paling cepat dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Hal ini diakibatkan adanya eksplorasi dan eksploitasi hutan demi kepentingan ekonomi semata. Greenpeace melakukan berbagai upaya melalui jalur komunikatif dengan pemerintah serta

²⁰ Ni Made Maha Putri Paramitha, 2016, *Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingnya Di Aceh Indonesia*, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya

menggendong WALHI dan WBH untuk ikut bergerak bersama greenpeace dalam mewujudkan bumi yang hijau dan damai. Greenpeace berhasil mengubah kebijakan pemerintah Indonesia yang sebelumnya tidak berpihak kepada lingkungan menjadi kebijakan pro ke lingkungan.²¹

Selanjutnya penulis mengambil rujukan skripsi dari Khunaipi yang berjudul “Peran International Committee of The Red Cross (ICRC) Dalam Konflik Aceh Melalui Program *Restoring Family link*”. ICRC merupakan lembaga kemanusiaan yang netral dan independen. Kerusakan di Aceh yang berkepanjangan memakan banyak korban baik dari masyarakat sipil maupun kombatan. Hal ini menjadikan isu Gerakan Aceh Merdeka hangat di kalangan internasional. Menimbang dari konflik yang berkepanjangan dan memakan banyak korban, membuat ICRC untuk turut bergerak dalam mengidentifikasi korban konflik tersebut. ICRC berasumsi bahwasanya ada perasaan psikologis terkait keluarga korban konflik baik dari masyarakat sipil maupun kombatan, dimana ada perasaan *need to know* dari keluarga mereka. Melalui program *restoring family link*, ICRC berupaya untuk melakukan reunifikasi agar keluarga dari masyarakat sipil ataupun kombatan tahu keadaan keluarganya.²²

Selain itu, penulis mengambil rujukan dari Yeyen Subandi dalam tesisnya yang berjudul “Peranan Ingo (International Non-Government Organization) Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus HIV & AIDS Di Indonesia”. Dalam tesis tersebut peneliti menjelaskan bahwasanya terdapat peran signifikan dari INGO

²¹ Rachmad Affandi, 2011, *Peran Green Peace Sebagai Organisasi Internasional Non-Pemerintah (INGO) Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Skripsi, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang

²² Khunaipi, 2012, *Peran International Committee of The Red Cross (ICRC) Dalam Konflik Aceh Melalui Program Restoring Family link*, Skripsi, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang

Australia yaitu HCPI (HIV Cooperation Program For Indonesia) dalam menanggulangi penyebaran virus HIV & AIDS yang terjadi di Indonesia. HCPI banyak di dukung oleh kalangan internasional dalam menjalankan programnya beberapa diantaranya adalah AusAID (Australian Agency For International Development) dan DFAT (Department of Foreign Appairs and Trade). HCPI bergerak atas dasar kemanusiaan, sukarela untuk melakukan penanggulangan penyebaran HIV & AIDS. Pemerintah Indonesia dianggap kurang tanggap dalam menyikapi HIV & AIDS yang terjadi, hal ini dikarenakan biaya yang terlampau tinggi untuk mencari vaksin dalam upaya menanggulangi HIV & AIDS. Namun, seiring waktu pemerintah Indonesia mulai sadar akan perlunya menanggulangi epidemik AIDS dengan mendukung HCPI dalam menanggulangi permasalahan epidemik AIDS di Indonesia. Seiring berjalannya waktu upaya dari HCPI membuahkan hasil dengan menurunnya tingkat penyebaran HIV & AIDS di Indonesia. Akan tetapi dengan anggaran biaya tinggi baik di level APBD maupun APBN dalam upaya penanggulangan penyebaran HIV & AIDS, pemerintah Indonesia masih belum bisa melakukan peningkatan penanggulangan HIV & AIDS secara maksimal. Peneliti menambahkan bahwasanya isu kesehatan saat ini sudah bukan menjadi isu domestik belaka, melainkan menjadi isu penting di kalangan internasional.²³

Selanjutnya penulis memilih rujukan skripsi dari Sri Sugiharti yang berjudul “Peran Ingo “*Save The Children*” Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia Tahun 2010-2015”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan

²³ Yeyen Subandi, 2016, *Peranan Ingo (International Non-Government Organization) Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus HIV & AIDS Di Indonesia*, Thesis, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada

terkait banyaknya tindak kekerasan dan eksploitasi anak salah satunya ESKA yang terjadi di seluruh dunia terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tindak ESKA sangat rawan terjadi di Indonesia dengan melihat adanya porstitusi aktif di kota-kota besar Indonesia yang berpotensi terjadinya tindak ESKA terhadap anak-anak untuk dipekerjakan sebagai PSK. Dari data penelitian kasus ESKA yang terjadi di Indonesia diperkirakan mencapai 30 persen PSK kurang dari usia 18 tahun dan bahkan terdapat diantaranya yang masih berusia 10 tahun. Sekitar 40.000 hingga 70.000 anak di Indonesia menjadi korban ESKA dan terdapat sejumlah 150.000 anak dipekerjakan sebagai PSK setiap tahunnya. Hal ini yang kemudian mendorong Save the Children sebagai INGO yang berfokus untuk melindungi anak di seluruh dunia dari kekerasan dan eksploitasi termasuk ESKA untuk mengupayakan penyelesaian tindak ESKA yang terjadi di Indonesia. Save the Children kemudian mengembalikan hak bagi para korban ESKA di Indonesia seperti hak mendapat pendidikan, akses kesehatan, kehidupan layak dan lebih baik. Save the Children juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan pengawasan serta koordinasi terkait permasalahan ESKA dibawah kelompok kerja sektoral atau gugus trafficking permasalahan ESKA di Indonesia.²⁴

Rujukan penelitan yang terakhir diambil penulis disini adalah skripsi dari Brian Aziz Ibrahim yang berjudul “Peran Amnesty International Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Di Indonesia Tahun 2015”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pengungsi Rohingnya yang datang ke Indonesia pada tahun 2015 dengan jumlah yang lebih besar daripada pengungsi Rohingya di

²⁴ Sri Sugiharti, 2017, *PERAN INGO “Save The Children” Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia Tahun 2010-2015*, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Malaysia maupun di Thailand. Indonesia sendiri bukanlah negara yang meratifikasi konvensi mengenai status pengungsi 1951 dan juga protokol 1967, sehingga keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Amnesty Internasional kemudian langsung tanggap untuk menyikapi dan membantu menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Selanjutnya Amnesty Internasional melakukan penelitian untuk mengetahui latar belakang serta profil terkait pengungsi Rohingya untuk mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap mereka. Penelitian tersebut kemudian dipublikasikan secara rutin kepada masyarakat internasional dengan tujuan untuk mendapatkan suara dukungan dari kalangan internasional agar supaya kasus pengungsi Rohingya segera teratasi. Selain itu Amnesty Internasional juga melakukan lobi kepada pemerintah Indonesia untuk menjaga dan melindungi hak asasi para pengungsi Rohingya. Amnesty Internasional juga melakukan kampanye melalui media cetak dan media daring dengan melakukan penggalangan suara melalui petisi daring serta kampanye daring bagi pengungsi Rohingya. Dengan adanya tekanan dari berbagai kalangan internasional berkat upaya yang dilakukan Amnesty Internasional, pemerintah Indonesia pada akhirnya mau untuk menampung dan mengakomodasi serta menjamin hak asasi pengungsi Rohingya di Indonesia.²⁵

Sedangkan, penelitian ini membahas terkait upaya Amnesty Internasional dalam penyelesaian pelanggaran HAM terhadap imigran Haiti beserta keturunannya. Dalam susunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dalam mengkaji terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Republik Dominika. Penulis membahas terkait faktor pendorong imigrasi imigran Haiti,

²⁵ Brian Aziz Ibrahim, 2016, Peran Amnesty International Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Di Indonesia Tahun 2015, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada

doktrin sejarah yang mengakibatkan munculnya perlakuan diskriminatif, rasisme dan xenophobia, serta pelanggaran yang dilakukan *by commission* (dari pemerintah ke imigran Haiti) dan *by omission* (dari masyarakat Republik Dominika ke imigran Haiti). Selanjutnya penulis membahas terkait posisi Amnesty Internasional sebagai pergerakan *global civil society* yang telah diakui oleh dunia internasional keberadannya serta membahas terkait strategi Amnesty Internasional dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM terhadap imigran Haiti di Republik Dominika.



Tabel 1.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Peran Amnesty Internasional Dalam Pembebasan Aung San Suu Kyi/Rosita Lina Simamora	<ul style="list-style-type: none"> Konsep HAM Penelitian Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> Amnesty Internasional mengumpulkan data serta informasi terkait penangkapan Aung San Suu Kyi pada tahun 2003 oleh Junta Militer Amnesty Internasional menginformasikan ke berbagai pihak internasional baik negara, organisasi internasional serta PBB Amnesty Internasional terhambat karena sikap Junta Militer yang tidak terlalu peduli terhadap kecaman internasional yang didapatkan Junta Militer kembali memperpanjang masa tahanan Aung San Suu Kyi
2.	Peran UNHCR (<i>United Nation High Comission for Refugees</i>) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Korban Konflik Suriah Yang Berada Di Negara Transit Hongaria/Paulus Salvio Renno Renyaan	<ul style="list-style-type: none"> Konsep Peranan Organisasi Internasional Penelitian Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> UNHCR secara umum telah melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Suriah yang berada di negara transit Hongaria UNHCR dalam menjalankan perannya mendapat berbagai tantangan, akan tetapi UNHCR dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan baik dan tepat. UNHCR selalu aktif bekerjasama dengan pemberi suaka lainnya baik komunitas maupun organisasi dalam tingkat domestik ataupun transglobal
3.	Peranan <i>World Wide Fund For Nature</i> (WWF) Dalam Upaya Konservasi Populasi Badak	<ul style="list-style-type: none"> Konsep Peranan Organisasi Internasional Konsep Konservasi Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> WWF sebagai salah satu Organisasi Internasional memainkan peranan penting di Indonesia, khususnya dalam upaya konservasi populasi badak jawa

	Jawa Di Indonesia/ Eca Chairunnisa	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Program-program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan, telah menunjukkan hasil bahwa adanya peningkatan jumlah populasi badak jawa di Indonesia
4.	Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Nigeria, Korban Kelompok Radikal Boko Haram/ Lucky Deriputra Harefa	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Peran Organisasi Internasional • Penelitian Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan terror yang dilakukan oleh kelompok radikal Boko Haram menyebabkan banyak korban tewas dan luka-luka di kalangan penduduk sipil. • Banyak penduduk merasa terancam dan kemudian memutuskan untuk mengungsi ke negara-negara tetangga Nigeria. • UNHCR memenuhi hak-hak para pengungsi, mencakup hak untuk hidup, hak mendapat kebebasan dan keamanan pribadi. • UNCHR melakukan kerjasama perlindungan dan pengurusan pengungsi dengan pemerintah Nigeria dan pemerintah negara tetangga lainnya seperti Kamerun, Chad dan Niger. • UNHCR juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemanusiaan seperti WHO, WFP, ACTED, IOM dan organisasi internasional lainnya t untuk memberikan fasilitas bagi para pengungsi.
5.	Peranan UNHCR Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya Di Aceh Indonesia/ Ni Made Maha Putri Paramitha	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Peranan Organisasi Internasional • Penelitian Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Myanmar melarang penggunaan istilah Rohingya dan mendaftarkan orang-orang Rohingya sebagai orang Bengali dalam sensus penduduk dan mencabut kartu identitas penduduk bagi orang-orang Rohingya yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraannya dan tidak

			<p>mendapatkan hak-hak politiknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orang-orang Rohingya mengungsi ke Thailand, Malaysia dan Indonesia. • Upaya yang diberikan oleh UNHCR merupakan solusi jangka panjang yang terdiri dari integrasi lokal, pemulangan secara sukarela, atau penempatan di negara ketiga. • Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia sudah sesuai dengan statuta UNHCR.
6.	Peran Green Peace Sebagai Organisasi Internasional Non-Pemerintah (INGO) Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia/Rachmad Affandi	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Global Civil Society • Konsep Administrasi dan Organisasi Internasional • Konsep Globalisasi Ekonomi • Penelitian Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Greenpeace memiliki tujuan untuk mewujudkan bumi yang damai dan hijau • Greenpeace masuk ke Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan memiliki tingkat kerusakan hutan dalam kurun waktu 50 tahun terakhir akibat kepentingan ekonomi • Greenpeace tidak melakukan aksi dalam bentuk kekerasan dan tidak menerima sumber pendanaan dari pemerintah, maupun korporasi tertentu • Untuk memperlancar aksinya Greenpeace bekerjasama dengan LSM seperti WALHI dan WBH • Greenpeace berhasil mempengaruhi <i>stakeholder</i> untuk merancang suatu kebijakan yang pro terhadap lingkungan
7.	Peran International Committee of The Red Cross (ICRC) Dalam Konflik Aceh Melalui Program <i>Restoring</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Global Civil Society • Konsep Organisasi Internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • ICRC mengemban misi untuk memperkuat serta memajukan Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku secara universal.

	<i>Family link/Khunaipi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Resolusi konflik • Konsep Humanitarian Action • Hukum Humaniter Internasional • Penelitian Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • ICRC merupakan organisasi internasional non-profit, netral dan tidak memihak • ICRC banyak bekerja sama dengan perhimpunan nasional seperti organisasi palang merah dan juga bulan sabit merah, untuk mencapai tujuan utamanya • konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintahan Indonesia memakan banyak korban termasuk juga terpisahnya anggota keluarga • ICRC masuk untuk menjalankan program <i>Restoring Family Link</i>, yakni suatu program reunifikasi kembali keluarga yang terpisah akibat konflik yang telah terjadi
8.	Peranan INGO (International Non-Government Organization) Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus HIV & AIDS Di Indonesia/ Yeyen Subandi	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Kerjasama Internasional • Teori Peranan Organisasi Internasional • Isu Kesehatan Dalam Dinamika Hubungan Internasional • Penelitian Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • HCPI (HIV Cooperation Program For Indonesia) merupakan INGO asal Australia yang banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan internasional • Indonesia belum mampu menanggulangi permasalahan HIV & AIDS • HCPI masuk ke Indonesia mulai dari tahun 1997 untuk membantu menanggulangi HIV & AIDS di Indonesia • Epidemi HIV & AIDS menjadi permasalahan kolektif internasional • Pemerintah Indonesia seiring waktu turut mendukung HCPI dalam menanggulangi penyebaran HIV & AIDS • HIV & AIDS menjadi isu baru di kalangan internasional sebagai isu kesehatan yang sangat penting untuk ditanggulangi penyebarannya

			<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan kemanusiaan dari HCPI meningkat dari tahun ke tahun dalam menanggulangi penyebaran HIV & AIDS di Indonesia • Pemerintah Indonesia merasa kesulitan dalam hal anggaran biaya baik dalam ranah APBD maupun APBN dalam upaya penanggulangan HIV & AIDS
9.	Peran INGO “ <i>save the children</i> ” Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia Tahun 2010-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Peranan NGO menurut Noelen Heyzer, James V.Ryker, dan Antonio B. Quizon • Konsep Peranan NGO menurut David Lewis dan Nazneen Kanji • Penelitian Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia negara berkembang dan tak luput dari permasalahan ESKA • Terdapat 30 persen PSK yang berusia kurang dari 18 tahun • Sekitar 150.000 anak menjadi korban ESKA tiap tahunnya • Save the Children INGO yang berfokus pada permasalahan kekerasan dan eksploitasi anak diseluruh dunia terutama negara berkembang • Save the Children berfokus pada empat titik kota prostitusi aktif di Indonesia yakni Bandar Lampung, Bandung Surabaya dan Pontianak • Tempat porstitusi aktif berpotensi terdapatnya anak-anak yang menjadi korban ESKA di Indonesia • Save the Children mengupayakan pengembalian hak-hak anak yang telah terjerat ESKA seperti hak pendidikan, akses kesehatan dan kehidupan lebih baik • Save the Children melakukan pelayanan langsung terhadap anak-anak korban ESKA baik layanan social maupun layanan ekonomi • Save the Children melakukan kerjasama dengan pemerintah melalui pembentukan kelompok kerja lintas sektoral atau gugus trafficking dalam

			permasalahan ESKA untuk koordinasi berkelanjutan
10.	Peran Amnesty International Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Di Indonesia Tahun 2015/Brian Aziz Ibrahim	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep aktor non-negara • Penelitian Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • Amnesti Internasional sebagai penengah untuk pencarian solusi bagi pengungsi rohingya dengan cepat dan efektif dikarenakan banyaknya kerjasama dari banyak pihak sehingga pengambilan kesepakatan bersama sulit untuk di capai • Pengungsi Rohingya terbesar terdapat di Indonesia pada tahun 2015 selain di Malaysia dan Thailand • Indonesia tidak meratifikasi konvensi terkait status pengungsi tahun 1951 dan protokol 1967, sehingga keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia sangat rentan akan terjadinya pelanggaran HAM • Amnesti Internasional langsung tanggap dan secara aktif membantu penanganan pengungsi Rohingya dan aktif dalam mengadvokasi pihak-pihak terkait • Amnesti Internasional melakukan berbagai penelitian untuk mengetahui profil pengungsi Rohingya beserta latar belakang terjadinya eksodus pengungsi Rohingya • Amnesti Internasional melakukan publikasi secara akurat dan rutin dengan memanfaatkan media cetak maupun media daring untuk menyampaikan kepada masyarakat dunia terkait apa yang terjadi terhadap pengungsi Rohingya • Amnesti Internasional melakukan lobi langsung kepada pemerintah Indonesia, melakukan kampanye melalui

			<p>daring, membuat petisi daring, dengan tujuan untuk memperjuangkan hak asasi dari pengungsi Rohingya agar mendapat perlakuan yang layak dan terlindungi dari ancaman terjadinya pelanggaran HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amnesty Internasional berhasil membujuk pemerintah Indonesia untuk menerima dan mengakomodasi ratusan pengungsi Rohingya di Indonesia
11.	Upaya Amnesty Internasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Terhadap Imigran Haiti Beserta Keturunannya di Republik Dominika	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep HAM • Teori Global Civil Society 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran HAM terjadi karena doktrin sejarah panjang sejak zaman kolonialisme yang terjadi, trauma akan berdirinya kembali <i>Republic of Haiti</i>, trauma akan terjadinya kembali tindak genosida <i>parsley massacre</i> yang menelan sejumlah 15.000 korban jiwa. • Krisis politik dan keadaan sosial ekonomi yang buruk menjadi faktor pendorong migrasi bagi masyarakat Haiti untuk mencari kehidupan lebih layak. • Amnesty Internasional sudah diakui posisinya sebagai <i>global civil society</i> yang memiliki pengaruh cukup besar di ranah internasional. • Amnesty Internasional sebagai pergerakan <i>global civil society</i> mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM dengan mendesak pemerintahan Republik Dominika. • Terdapat empat strategi Amnesty Internasional dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap imigran Haiti, melalui <i>visibility</i> dengan menerbitkan laporan, video, poster dan

			<p>menggalang aksi turun ke jalan untuk memprotes pemerintah Republik Dominika. <i>Audibility</i> melakukan sosialisasi kepada masyarakat Republik Dominika terkait pelanggaran HAM yang terjadi dan menyebarkan isu pelanggaran HAM terhadap imigran Haiti di Republik Dominika dalam pertemuan <i>Universal Periodic Review</i> PBB. <i>Lobbying</i> menjalin kerjasama dengan pihak-pihak berpengaruh seperti IACHR, PBB dan Presiden Republik Dominika. <i>Networking</i> menjalin hubungan kerjasama dengan <i>civil society</i> local untuk membantu menyelesaikan permasalahan HAM yang terjadi.</p>
--	--	--	---

1.5 Kerangka Teori dan Konsep

Dalam menganalisa peran Amnesty Internasional dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap korban deportasi Republik Dominika, disini penulis menggunakan teori dan konsep untuk mendukung permasalahan yang sedang di teliti. Teori dan konsep yang digunakan adalah Teori *Global Civil Society* dan Konsep Hak Asasi Manusia.

1.5.1 Teori *Global Civil Society*

Masyarakat sipil global atau *global civil society* merupakan suatu jaringan atau koalisi aktivis atau NGOs yang berupaya untuk mempengaruhi suatu kebijakan, politik global, sosial dan ekonomi melalui cara-cara yang komunikatif. Jorgen Habermas berpendapat bahwa global

civil society muncul melalui negara yang memiliki '*public sphere*', yakni suatu ruang dimana masyarakat bebas untuk menyalurkan aspirasi maupun pendapatnya tanpa ada pengaruh dari pihak manapun, sehingga tidak akan terjadi hegemoni dari suatu pihak maupun pemerintahan.²⁶ Namun, tidak ada definisi tunggal dan pasti terkait makna dari global civil society, hingga saat ini *global civil society* masih menjadi perdebatan diantara para ahli.

Global Civil Society merupakan suatu ruang bebas bagi masyarakat tanpa adanya intervensi pasar, politik serta ekonomi. Tidak bergantung pada satu pihak, melainkan terdapat individu-individu maupun kelompok kolektif untuk menentukan suatu kepentingan bersama yang memiliki ruang lingkup secara global atau transnasional. *Global Civil Society* mencakup kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas, organisasi non-pemerintah, gerakan sosial, serikat buruh, organisasi amal, organisasi berbasis agama, akademisi, asosiasi profesional, yayasan yang ruang lingkungannya transnasional melewati batas wilayah suatu negara dan berfokus terhadap suatu isu tertentu. Keberadaan *Global Civil Society* menjadi semakin relevan di ranah internasional. Terdapat banyak dari *Global Civil Society* yang berhasil mempengaruhi kebijakan dan hukum internasional, melalui diplomasi tanpa menggunakan kekerasan. *Global Civil Society* juga banyak terlibat dalam penanganan isu-isu global yang terjadi. Sehingga

²⁶ Jon Wiltshire, *Global Civil Society and Global Democracy*, <http://www.globalpolicyjournal.com/blog/11/07/2013/global-civil-society-and-global-democracy>, (01/04/2017 04:50)

Global Civil Society akan menjadi pertimbangan negara untuk bertindak dalam ranah internasional.²⁷

Global Civil Society terus berkembang dan meningkat seiring dengan isu-isu baru yang bermunculan, hal ini dikarenakan pergeseran sistem pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir, yang mulanya bergerak atas dasar kepentingan nasional dalam perumusan kebijakan dalam merumuskan suatu kebijakan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti peraturan lokal, nasional, regional dan global. terdapat sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh negara terhadap masyarakatnya seperti misal pengawasan HAM yang menyeluruh, pemerataan tingkat kesejahteraan, kesenjangan perekonomian masyarakat dan lain sebagainya. Pada akhirnya *Global Civil Society* yang tergerak pada fokus isu tertentu turut andil dalam mengawasi tata kelola pemerintahan negara sesuai dengan fungsinya.²⁸

Global Civil Society selalu terhubung ke wilayah akan tetapi tidak terbatas oleh wilayah dan selalu terhubung dengan banyak lembaga serta memiliki jaringan yang cukup luas. *Global Civil Society* berdiri secara independen diluar kepentingan politik dan ekonomi. *Global Civil Society* terbentuk atas dasar sukarela untuk melindungi kepentingan atau nilai-nilai tertentu. *Global Civil Society* dipandang sebagai ruang sosial yang otonom yang mana individu-individu, kelompok dan suatu gerakan yang secara

²⁷ Raffaele Marchetti, *Global Civil Society*, <http://www.e-ir.info/2016/12/28/global-civil-society/>, (01/04/2017 15:58)

²⁸ Jan Aart Scholte, "Global Civil Society: Changing The World?", CSGR Working Paper No. 31/99, 1999, Hal.16-18

efektif dapat mempengaruhi , membatalkan , dan mengubah suatu kebijakan yang ada.²⁹

Global Civil Society memiliki tujuan utama yang menjadi landasan bagi para anggotanya untuk bergabung secara sukarela demi tercapainya kepentingan kolektif. Berdasarkan tujuannya, *Global Civil Society* dapat di bagi menjadi tiga kelompok yakni konformis, reformis dan radikal. Kelompok konformis merupakan kelompok *Global Civil Society* yang bergerak untuk memperkuat serta menegakkan norma-norma yang sudah ada sebelumnya. yang termasuk kelompok konformis beberapa diantaranya adalah organisasi asosiasi profesional, business lobbies, organisasi *Think Tank* dan lain sebagainya. kelompok kedua adalah reformis kelompok ini bergerak untuk menilai, mengawasi dan memperbaiki sesuatu yang dianggap salah dalam suatu rezim atau tata pemerintahan suatu negara, misalnya akademisi, consumer associations, kelompok HAM dan lain sebagainya. kelompok yang terakhir adalah kelompok radikal yakni *Global Civil Society* yang bergerak langsung guna merubah suatu tatanan sosial untuk menerapkan perspektif tertentu. kelompok radikal kebanyakan terdiri dari gerakan sosial seperti misalnya kelompok pecinta lingkungan, feminis, fasis, dan lain sebagainya. kelompok konformis bergerak melalui cara *lobbying*, melakukan penelitian dan bekerjasama dengan otoritas yang sudah ada secara diam-diam, berbeda dengan kelompok reformis dan radikal yang banyak bergerak melalui cara demonstrasi, publikasi dan

²⁹ John Keane, *Global Civil Society?*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), Hal. 29

mengimbangi kekuatan oposisi dengan tidak melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan otoritas atau agen pemerintahan terkait.³⁰

Dalam upaya untuk mencapai kepentingan utamanya *Global Civil Society* memiliki beberapa strategi sendiri. Marc Edelman membagi strategi tersebut menjadi empat. Pertama, *Visibility* yakni strategi yang bertujuan agar target bisa melihat aksi atau gerakan nyata melalui penglihatan mereka secara langsung. Kedua, *Audibility* merupakan strategi yang bertujuan supaya target bisa mendengar protes yang tengah dilakukan. kedua strategi tersebut bertujuan untuk meyakinkan target, terkait keseriusan pihak terkait dalam mengupayakan penyelesaian isu yang terjadi. Ketiga, *Lobbying* yakni strategi yang digunakan oleh NGO ataupun kelompok kepentingan untuk menjalin hubungan secara advokatif dengan pemerintahan terkait atau organisasi yang memiliki kapasitas pengaruh diatas negara, dengan maksud melakukan negoisasi untuk mencari jalan keluar atas suatu peristiwa yang terjadi. Keempat, *Networking* merupakan suatu strategi untuk menjalin hubungan dengan masyarakat internasional, LSM bahkan masyarakat sipil, untuk menggalang dukungan terkait kampanye atau demonstrasi yang dilakukan.³¹

Amnesti Internasional merupakan *Global Civil Society* yang memiliki anggota yang tersebar di seluruh dunia dan tergabung dalam kepentingan yang sama untuk memajukan dan mempromosikan HAM sesuai yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan

³⁰ Jan Aart Scholte, Op.cit, Hal. 6-7

³¹ Marc Edelman, 2001, *Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics*, Annual Review of Anthropology, Vol. 30, Hal. 371

standar internasional lainnya yang berkaitan dengan HAM, tanpa adanya intervensi politik, pasar, pemerintahan maupun otoritas tertentu. Berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Republik Dominika, Amnesty Internasional memanfaatkan *free public sphere* untuk berkampanye dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap imigran Haiti beserta keturunannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun melalui media cetak dan jejaring sosial.

Amnesty Internasional termasuk kelompok *Global Civil Society* Reformis, dimana Amnesty Internasional mulai berfokus ke Republik pada tahun 1991 untuk mengawasi, menilai dan berupaya memperbaiki nilai yang bertentangan dengan penghormatan HAM. Dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap imigran Haiti beserta keturunannya di Republik Dominika Amnesty Internasional menggunakan strategi *Visibility* dengan melakukan kampanye, menerbitkan poster, baik dalam skala domestik maupun internasional. Selanjutnya Amnesty Internasional menggunakan strategi *Audiobility* seperti pengumpulan data serta bukti faktual yang ada untuk kemudian disebarluaskan ke masyarakat dunia, selain itu Amnesty Internasional juga mengunggah video melalui media internet untuk memberitahu dunia internasional terkait apa yang sebenarnya terjadi di Republik Dominika. Kedua strategi tersebut dijalankan untuk menunjukkan aksi nyata dan keseriusan Amnesty Internasional dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Republik Dominika. Amnesty Internasional kemudian menggunakan strategi *Lobbying* melalui advokasi

dengan pihak terkait seperti badan PBB dan pemerintah Republik Dominika untuk mendesak secara advokatif agar tidak mengabaikan hak para imigran Haiti beserta keturunannya. Selanjutnya,

Amnesti Internasional menggunakan strategi *Networking* dengan menyebarkan petisi online, untuk mengajak masyarakat internasional turut andil dalam mendukung penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Republik Dominika. Selain itu, Amnesti Internasional juga menjalin hubungan kerjasama dengan LSM setempat dan juga masyarakat domestik untuk menggalang dukungan serta bantuan dalam mempercepat proses penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi.

1.5.2 Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau HAM, seringkali dipahami sebagai hak-hak dasar manusia yang inheren dimiliki oleh setiap manusia. Pada abad ke-18 konsep HAM yang muncul adalah manusia dipandang sebagai individu yang otonom, diberkati oleh alam dengan hak-hak fundamental tertentu, yang secara mutlak harus dilindungi dan dijaga oleh pemerintah. Kemudian HAM dipandang sebagai prasyarat dasar untuk kehidupan manusia yang lebih bermartabat. HAM bersifat universal, artinya HAM berlaku untuk setiap manusia yang ada di dunia. HAM melekat pada diri setiap individu sejak dilahirkan sampai meninggal. HAM tidak dapat dicabut oleh pemerintah, melainkan pemerintah harus melindungi, menjaga dan

berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran HAM kepada setiap individu.³²

Penandatanganan piagam PBB pada tanggal 26 Juni 1945, menjadikan HAM berada dibawah ketentuan Hukum Internasional. Semua anggota PBB sepakat untuk mengambil tindakan terkait perlindungan HAM. Hal ini terlihat dari sejumlah kesepakatan yang mengacu pada HAM.³³ Selain itu, dalam pasal 17 (1) dan (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa :

Article 17 :³⁴

- 1. No One shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home, correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*
- 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus mencegah dan melindungi individu dari setiap ancaman HAM yang datang. Dan setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.

Untuk menangani permasalahan pelanggaran HAM, PBB juga memiliki instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum guna mengatasi permasalahan pelanggaran HAM yang khusus. Diantara dari

³² Icelandic Human Rights Centre, *Definition And Classifications*, <http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/part-i-the-concept-of-human-rights/definitions-and-classifications>, (01/04/2017 22:21 WIB)

³³ Ibid.

³⁴ United Nations Human Rights, *International Covenant on Civil and Political Rights*, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>, (01/04/2017 23:11 WIB)

instrumen tersebut tertuang dalam bentuk taktat-traktat tentang pencegahan dan penghukuman tindak genosida, larangan diskriminasi seksual dan agama, pemusnahan dan penghukuman terhadap apartheid, larangan praktek penyiksaan, kerjasama internasional untuk permasalahan pengungsi dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan permasalahan hak anak-anak.³⁵

Pelanggaran HAM merupakan suatu tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh aparatur negara (*state-actors*) maupun bukan aparatur negara (*non state-actors*) terhadap hak asasi individu atau kelompok lain tanpa didasari alasan yang rasional secara yuridis. Terdapat dua bentuk pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi tindak genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran HAM ringan merupakan pelanggaran hak asasi terhadap individu ataupun kelompok diluar konteks pelanggaran HAM berat. Tindak genosida merupakan suatu pelanggaran HAM yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok, ras, etnis, kelompok agama dan sebagainya. Tindak genosida dilakukan dengan cara membunuh keseluruhan atau sebagian dari kelompok tertentu untuk mencegah kelahiran dari kelompok tersebut, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Sedangkan pelanggaran kejahatan kemanusiaan mengacu pada bagian dari suatu tindakan pelanggaran HAM yang sistematis, secara langsung ditujukan kepada

³⁵ Scott Davidson, *Human Rights* (terj.), Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 1994, Hal.19

penduduk sipil suatu kelompok, seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan, penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan hak sebagai warga negara, pemindahan penduduk secara paksa, kesewenangan yang melanggar asas-asas hukum internasional, tindak diskriminasi terhadap suatu kelompok, ras, agama dan lain sebagainya.³⁶

Terdapat dua jenis pelanggaran HAM, pelanggaran HAM secara vertikal dan pelanggaran HAM secara horizontal. Pelanggaran HAM secara vertikal merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara kepada rakyat. Sedangkan pelanggaran HAM horizontal adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rakyat kepada sesamanya. Terkait yang memiliki tanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi hingga saat ini masih menjadi perdebatan kalangan para ahli. Namun, setidaknya terdapat dua pandangan mengenai penanggung jawab HAM. Pandangan pertama berasumsi bahwa yang berhak untuk menjamin, melindungi dan memenuhi HAM adalah negara, karena kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek terbentuknya suatu negara. Maka negara memiliki tanggung jawab penuh atas perlindungan HAM terhadap masyarakatnya. Negara haruslah memberi pendidikan terkait HAM kepada rakyatnya. Sebab, minimnya pengetahuan masyarakat suatu negara terkait permasalahan HAM menjadi faktor pemicu pelanggaran HAM. Dengan diberikannya pemahaman terkait HAM kepada masyarakat, maka masyarakat akan bisa menghormati HAM individu maupun kelompok lainnya.³⁷

³⁶ Dede Rosyada, et al., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, & Masyarakat Madani* (Rev.ed), Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005, Hal.228-229

³⁷ Ibid. Hal 230-231.

Suatu negara yang tidak memberikan pemahaman terkait HAM kepada masyarakatnya dapat dikatakan negara tersebut mengabaikan amanat rakyat. Legitimasi negara dipegang penuh oleh masyarakat, sehingga negara harus bertanggung jawab untuk melindungi HAM warganegaranya. Norma hukum internasional menjadi acuan negara untuk menjamin hak tiap individu dalam negaranya seperti piagam HAM dunia yang dideklarasikan oleh PBB, beberapa Kovenan, Hukum Perjanjian Internasional terkait HAM, Piagam Madinah, Deklarasi Kairo dan lain sebagainya. Setiap individu dalam suatu negara memiliki hak asasi yang bersifat *non derogable rights* (hak yang harus dilindungi meskipun dalam keadaan perang) dan *derogable rights* (hak yang harus dilindungi dalam keadaan normal) realisasi dari HAM tersebut harus berada dibawah tanggung jawab negara. Pelanggaran HAM negara bisa melalui *by commission* (pelanggaran HAM secara langsung oleh negara) dan *by omission* (pelanggaran HAM secara tidak langsung).³⁸ Pandangan kedua berasumsi bahwa individu dan negara memiliki porsi yang sama dalam tanggung jawab, penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Sebab pelanggaran HAM tidak selalu dilakukan oleh aparaturnegara terhadap rakyatnya melainkan terdapat juga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu kepada individu lain, seperti perbudakan oleh seorang majikan, pembunuhan yang dilakukan oleh sipil bersenjata, pemerkosaan, perampokan dan lain-lain. Sesuai apa yang tertuang dalam prinsip demokrasi bahwasanya masyarakat juga harus mengawasi jalannya

³⁸ Ibid.

pemerintahan. Pemerintahan bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dalam hal ini setiap individu juga memiliki kewajiban untuk turut serta mengambil tindakan atas kewajiban pemerintah terkait perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM.³⁹

Sebagaimana yang telah disepakati dalam *Universal Declaration of Human Rights* bahwasanya HAM bersifat Universal, artinya berlaku bagi siapapun sejak dilahirkan sampai meninggal. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Republik Dominika. Pelanggaran HAM banyak terjadi di republik dominika baik yang dilakukan oleh *state actors* maupun oleh *non state-actors*. pelanggaran HAM yang terjadi di Republik Dominika mulanya dilakukan secara vertikal yaitu ketika tindak genosida dilakukan oleh pemerintah Republik Dominika pada saat kepemimpinan Trujillo Molina pada tahun 1937 terhadap imigran Haiti yang kemudian menjadi doktrinisasi sejarah bagi masyarakat Republik Dominika, sehingga pelanggaran HAM yang terjadi tidak hanya sebatas vertikal melainkan juga merambah ke ranah horizontal dari perlakuan diskriminatif, rasisme dan xenophobia terhadap imigran Haiti beserta keturunannya.

Terdapat pelanggaran HAM langsung yang dilakukan oleh *state actors* Republik Dominika seperti halnya kepengurusan akta kelahiran, surat identitas imigran Haiti beserta keturunannya yang dipersulit oleh pemerintahan Republik Dominika, tindak deportasi yang dilakukan atas identifikasi warna kulit semata, dan juga keputusan Mahkamah Konstitusi

³⁹ Ibid, Hal.231-232

Republik Dominika terkait pencabutan kewarganegaraan bagi keturunan Haiti yang lahir di Republik Dominika yang bertentangan dengan konstitusi dasar Republik Dominika dimana dalam konstitusi dasar Republik Dominika menganut asas kewarganegaraan *ius soli*. Selain itu juga terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh *non state-actors* seperti pemberian upah murah dan tempat tinggal tidak layak kepada pekerja imigran Haiti, serta bentuk perlakuan diskriminatif, rasisme maupun xenophobia yang dilakukan masyarakat Republik Dominika kepada imigran Haiti beserta keturunannya.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode / Tipe Penelitian

Dalam meneliti terkait upaya Amnesty Internasional dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia korban deportasi Republik Dominika, penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif dimana penelitian akan dilakukan dengan cara menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik yang berlangsung saat ini maupun yang telah terjadi di masa lampau. Fenomena yang terjadi akan dijelaskan apa adanya tanpa adanya manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas.

1.6.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang di gunakan penulis disini adalah teknik analisa Induktif, dimana penulis mengambil kesimpulan secara umum dengan berdasar pada pengetahuan yang diperoleh dari fakta-

fakta khusus. Dengan demikian teknik Induktif mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian menjelaskan secara umum terkait apa yang diteliti.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam membantu penelitian disini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka atau *Library Research*. Dimana penulis mencari dan membaca referensi yang mendukung isi penelitian yang bersumber dari buku, website, jurnal, e-jurnal, e-book, laporan penelitian atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Adapun Batasan waktu yang digunakan oleh peneliti ini adalah semenjak Amnesty Internasional mulai bergerak untuk meneliti pelanggaran HAM yang terjadi terhadap imigran Haiti beserta keturunannya yang menetap di Republik Dominika pada tahun 2004, pasca Mahkamah Konstitusi Republik Dominika mengeluarkan peraturan terkait status imigran Haiti hingga munculnya peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Dominika No. 168-13 pada tahun 2013 yang bertentangan dengan konstitusi dasar Republik Dominika terkait pencabutan kewarganegaraan imigran Haiti beserta keturunannya yang lahir di Republik Dominika.

b. Batasan Materi

Batasan ruang materi penelitian yang di ambil penulis disini adalah terkait upaya yang telah dilakukan oleh Amnesti Internasional terhadap Republik Dominika dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap imigran Haiti beserta keturunannya sehingga mempengaruhi otoritas Republik Dominika untuk melakukan pembaharuan peraturan agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang serupa.

1.7 Argumen Pokok

Berdasarkan konsepsi HAM dan *Global Civil Society* dapat dilihat Upaya dari Amnesti Internasional dalam mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Republik Dominika terhadap imigran Haiti beserta keturunannya melalui strategi *Visibility* dengan berkampanye dan menerbitkan poster dan *Audibility* melalui penelitian secara rutin dan faktual, pembuatan video terkait pelanggaran HAM yang kemudian di publikasikan dalam skala internasional untuk menunjukkan aksi nyata dan keseriusan Amnesti Internasional. Strategi *Lobbying* melalui kerjasama dengan pihak yang berpengaruh seperti badan internasional dan otoritas Republik Dominika untuk mendesak secara advokatif agar tidak mengabaikan hak asasi para imigran Haiti beserta keturunannya. Strategi *Networking* dengan penyebaran petisi online untuk mengajak masyarakat domestik maupun internasional untuk turut andil dalam mendukung penyelesaian pelanggaran HAM. Amnesti Internasional juga bekerjasama dengan LSM setempat

yang memiliki kepentingan serupa untuk menekan otoritas Republik Dominika agar bertanggung jawab atas fenomena yang terjadi.

Sebagai *global civil society* penegak HAM yang telah memiliki citra baik di ranah internasional. Amnesty Internasional selalu bertindak sebagai kelompok reformis yakni kelompok yang berinisiasi untuk memperbaiki tatanan pemerintahan yang salah melalui cara yang komunikatif tanpa kekerasan dengan melakukan penelitian terkait latar belakang, profil, kondisi, bentuk pelanggaran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di Republik Dominika yang kemudian dipublikasikan dalam bentuk laporan detail secara rutin kepada masyarakat internasional dengan tujuan untuk menggalang suara dukungan dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di Republik Dominika. Selain itu, Amnesty Internasional juga melakukan kampanye baik secara langsung, melalui media cetak, media internet bahkan melakukan penandatanganan petisi secara internasional untuk mendukung imigran Haiti beserta keturunannya untuk dapat memperoleh hak asasinya sebagaimana yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Advokasi dengan pihak-pihak terkait seperti imigran Haiti, pemerintah Republik Dominika dan organisasi internasional lainnya juga turut dilakukan agar pelanggaran HAM bisa segera terselesaikan.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1.3.1 Tujuan Penelitian
 - 1.3.2 Manfaat Penelitian
 - 1.3.2.1 Manfaat Akademis
 - 1.3.2.2 Manfaat Praktis
- 1.4 Penelitian Terdahulu
- 1.5 Kerangka Teori dan Konsep
- 1.6 Metodologi Penelitian
 - 1.6.1 Metode / Tipe Penelitian
 - 1.6.2 Teknik Analisa Data
 - 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
 - 1.6.4 Ruang Lingkup
 - 1.6.4.1 Batasan Waktu
 - 1.6.4.2 Batasan Materi
- 1.7 Argumen Pokok
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II. IMIGRAN HAITI

- 2.1 Kondisi Masyarakat Haiti
- 2.2 Faktor Pendorong Migrasi Masyarakat Haiti
 - 2.2.1 Krisis Politik
 - 2.2.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi
- 2.3 Imigran Haiti di Republik Dominika

BAB III. PELANGGARAN HAM TERHADAP IMIGRAN HAITI

- 3.1 Dinamika Pelanggaran HAM
- 3.2 Pelanggaran HAM Oleh Pemerintah (*by comission*)
- 3.3 Pelanggaran HAM Oleh Masyarakat (*by omission*)

3.4 Masuknya Amnesti Internasional di Republik Dominika

3.4.1 Amnesti Internasional Sebagai *Global Civil Society*

3.4.2 Amnesti Internasional Sebagai Gerakan Reformis

BAB IV. UPAYA AMNESTI INTERNASIONAL

4.1 *Visibility*

4.2 *Audibility*

4.3 *Lobbying*

4.4 *Networking*

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

